SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 060/Kep.4701-ORG/2025
TENTANG
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025, untuk mengisi kekosongan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bandung perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025, tanggal 31 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

KESATU : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2025.

KEDUA : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KETIGA : Untuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, dilakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi melalui Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Terintegrasi dengan berpedoman kepada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 94/OT.03/ORG tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Terintegrasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Untuk menunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini, yang terdiri dari:

a. *Strategic Transformation Unit (STU)* merupakan unit pengelola reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bandung yang merupakan organ pimpinan yang dibentuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
b. pengampu indikator kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi General merupakan Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai pengampu ketercapaian indikator kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi General;
c. pengampu indikator kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik merupakan Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai koordinator pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik; dan
d. Tim Penilai Internal (TPI) atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal terkait ketercapaian indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, untuk dijadikan bahan tindaklanjut perbaikan dalam dokumen Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.

KELIMA : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Oktober 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

PEMERINTAH KOTA SETDA BANDUNG

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 060/Kep.4701-ORG/2025
TENTANG PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025

INDIKATOR, TARGET DAN PERANGKAT DAERAH PENGAMPU INDIKATOR REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025

No	Kegiatan Utama	Indikator	Capaian 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6
I.	Nilai Reformasi Birokrasi General				
1	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	4	4	Setda (Bagian Organisasi)
2	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	4,59	4,62	Diskominfo
		Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE	3	3	Diskominfo
3	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	81,4	81,94	Baperida, Setda (Bagian Organisasi) dan Inspektorat
4	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	0,5	4	Inspektorat
5	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	2,87	3	Inspektorat
6	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	4	4	Diskominfo
7	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	69,14	70,14	Inspektorat
8	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	71,50	71,51	Baperidan dan Setda (Bagian Hukum)
9	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	87,44	87,45	Setda

No	Kegiatan Utama	Indikator	Capaian 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6
10	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	77,70	78,00	Disarpus
11	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	3,04	3,04	Diskominfo
12	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	82,72	83,42	Setda (Bagian PBJ)
13	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WDP	WTP	BKAD
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	84,92	85,00	Inspektorat
14	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	359,5	364,90	BKPSDM
15	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak	82,90	83,50	BKPSDM
16	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88,28	88,28	Setda (Bagian Organisasi)
		Indeks Pelayanan Publik	4,68	4,7	Setda (Bagian Organisasi)
II.	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik				
1	Pengentasan Kemiskinan		3,87	3,68	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
2	Peningkatan Investasi		10,79	11,07	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Tim Percepatan Investasi Daerah (TPID);
3	Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan		N/A	57,26	Dinas Kesehatan
4	Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan		N/A	-	Dinas Pendidikan
5	Ketahanan Pangan Nasional		N/A	73,88	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6	Mendorong Hilirisasi		N/A	9.29	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
III.	NILAI INDEKS RB INSTANSI PEMERINTAH				

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 060/Kep.4701-ORG/2025
TENTANG PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025

EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2025

1. Indikator, Nilai dan Evaluator:
   a. Lingkup Sekretariat/Dinas/Badan:

Indikator Penilaian			Nilai	Evaluator
I.	Evaluasi RB *General* Perangkat Daerah		0-100	
	1.1	Monitoring Capaian Kinerja (CAPKIN) Perangkat Daerah	0-100	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	1.2	Monitoring Penyelesaian TLHP BPK RI	0-100	Inspektorat
	1.3	Monitoring Penyelesaian TLHP APIP	0-100	Inspektorat D
	1.4	Monitoring Laporan Realisasi Anggaran APBD	0-100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	1.5	Monitoring Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	0-100	Bagian Organisasi Setda
	1.6	Monitoring Pemanfaatan Sistem PBJ	0-100	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
	1.7	Monitoring Indeks Profesionalitas ASN	0-100	BKPSDM
	1.8	Monitoring tindak lanjut pengaduan (LAPOR)	0-100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1.9	Monitoring Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	0-100	Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
	1.10	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	0-100	Inspektorat
	1.11	Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	0-100	Inspektorat
	1.12	Evaluasi Budaya Kerja BerAKHLAK	0-100	BKPSDM
	1.13	Evaluasi Digitalisasi Arsip	0-100	Dinas Arsip dan Perpustakaan
	1.14	Evaluasi Pelayanan Publik	0-100	Bagian Organisasi Setda
	1.15	Evaluasi Kebijakan Publik	0-100	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

Indikator Penilaian			Nilai	Evaluator
	1.16	Evaluasi Kematangan SPBE	0-100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1.17	Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	0-100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1.18	Evaluasi Kualitas Produk Hukum Perangkat Daerah	0-100	Bagian Hukum Setda
	1.19	Evaluasi Indikator RB lainnya (bersifat opsional)	0-100	indikator lainnya sesuai dengan kebijakan masing-masing pemerintah daerah
II.	**Evaluasi Capaian Dampak Reformasi Birokrasi**		**0-100**	
	2.1	Rata-Rata Capaian IKU Kepala Perangkat Daerah	0-100	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	2.2	Inovasi Praktek Baik Pelaksanaan RB	0-100	STU/Tim RB Tematik dan/atau Tim Independen
	2.3	Strategi Penyelesaian Isu Aktual Pemerintahan	0-100	STU/Tim RB Tematik dan/atau Tim Independen
Nilai Evaluasi RB Perangkat Daerah			**0-100**	

b. Lingkup Kecamatan:

Indikator Penilaian			Nilai	Evaluator
I.	**Evaluasi RB *General* Perangkat Daerah**		**0-100**	
	1.1	Monitoring Capaian Kinerja (CAPKIN) Perangkat Daerah	0-100	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	1.2	Monitoring Penyelesaian TLHP BPK RI	0-100	Inspektorat
	1.3	Monitoring Penyelesaian TLHP APIP	0-100	Inspektorat
	1.4	Monitoring Laporan Realisasi Anggaran APBD	0-100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	1.5	Monitoring Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	0-100	Bagian Organisasi Setda
	1.6	Monitoring Pemanfaatan Sistem PBJ	0-100	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
	1.7	Monitoring Indeks Profesionalitas ASN	0-100	BKPSDM

Indikator Penilaian			Nilai	Evaluator
	1.8	Monitoring tindak lanjut pengaduan (LAPOR)	0-100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1.9	Monitoring Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	0-100	Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
	1.10	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	0-100	Inspektorat
	1.11	Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	0-100	Inspektorat
	1.12	Evaluasi Budaya Kerja BerAKHLAK	0-100	BKPSDM
	1.13	Evaluasi Digitalisasi Arsip	0-100	Dinas Arsip dan Perpustakaan
	1.14	Persentase Realisasi Kinerja PBB Perkotaan & Perdesaan	0-100	Bagian Tata Pemerintahan/ Badan Pendapatan Daerah
	1.15	Evaluasi Penerapan SPBE	0-100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1.16	Evaluasi Pelaksanaan Binwas Pemerintah Desa/Kelurahan		Bagian Tata Pemerintahan Setda
	1.17	Evaluasi Pembinaan KADARKUM	0-100	Bagian Hukum Setda
	1.18	Evaluasi Indikator RB lainnya (bersifat opsional)	0-100	indikator lainnya sesuai dengan kebijakan masing-masing pemerintah daerah
II.	**Evaluasi Capaian Dampak Reformasi Birokrasi**		**0-100**	
	2.1	Indeks Pelayanan Publik	0-100	Bagian Organisasi Setda
	2.2	Persentase Capaian Hasil Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan	0-100	Bagian Tata Pemerintahan Setda
	2.3	Persentase Capaian Evaluasi Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang dan Berkembang (EVKEL)	0-100	Bagian Tata Pemerintahan/ Tim Evaluasi Kelurahan (EVKEL) Tingkat Kota
Nilai Evaluasi RB Perangkat Daerah			**0-100**	

2. Kriteria Penilaian

Nilai hasil akhir evaluasi dari penjumlahan komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat/Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Angka	Predikat	Interpretasi
1.	AA	>90 - 100	Istimewa	Penerapan Reformasi Birokrasi mampu mewujudkan tata Kelola pemerintah yang efektif, efisien, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan pelayanan publik yang prima dan telah berkontribusi terhadap perbaikan kinerja organisasi, serta memberikan dampak yang luas terhadap penyelesaian permasalahan yang menjadi core business-nya.
2.	A	>80 - 90	Memuaskan	Penerapan Reformasi Birokrasi mampu mewujudkan tata Kelola pemerintah yang efektif, efisien, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan pelayanan publik yang prima dan telah berkontribusi terhadap perbaikan kinerja organisasi, serta memberikan dampak terhadap penyelesaian permasalahan yang menjadi *core business*-nya.
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi mampu mewujudkan tata Kelola pemerintah yang efektif, efisien, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan pelayanan publik yang prima dan telah berkontribusi terhadap perbaikan kinerja organisasi, namun belum memberikan dampak terhadap penyelesaian permasalahan yang menjadi core business-nya.
4.	B	>60 - 70	Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi mampu mewujudkan tata Kelola pemerintah yang efektif, efisien, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan pelayanan publik yang prima, namun belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5.	CC	>50 - 60	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal telah diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh sebagian besar korupsi, kolusi, dan nepotisme di Perangkat Daerah.

No	Kategori	Angka	Predikat	Interpretasi
6.	C	>40 - 50	Kurang Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal hanya diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh sebagian kecil aparatur sipil negara di Perangkat Daerah.
7.	D	0 - 40	Tidak Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi belum terlaksana.

3. Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

a. *PTU* Sekretariat/Dinas/Badan:

1. Penanggung jawab : Kepala Perangkat Daerah
2. Ketua : Sekretaris Perangkat Daerah/ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Perangkat Daerah
3. Sekretaris selaku asesor Perangkat Daerah : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah/Pejabat Pengawas pada Sekretariat Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Tata Usaha
4. Pengampu Indikator Reformasi Birokrasi :
   1) Capaian Kinerja Perangkat Daerah : Pejabat Fungsional Perencana/ Analis Perencanaan
   2) Nilai SAKIP Perangkat Daerah : Pejabat Fungsional Perencana/ Analis Perencanaan
   3) Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral : Pejabat Fungsional Perencana/ Analis Perencanaan
   4) Laporan Realisasi Anggaran : Kasubag Keuangan/Bendahara Pengeluaran/Pengelola Keuangan
   5) Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP : Kasubag Keuangan/Bendahara Pengeluaran/Pengelola Keuangan
   6) Nilai Pemanfaatan Sistem PBJ & Kepatuhan Realisasi P3DN : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pengadaan (PP) Perangkat Daerah
   7) Nilai Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat : Kasubag Umum dan Kepegawaian/ Pejabat Fungsional/Pengelola Layanan/Pengelola Data
   8) Nilai IP ASN : Kasubag Umum dan Kepegawaian/ Pejabat Fungsional Analis SDM Aparatur/Pengelola Kepegawaian
   9) Indeks BerAKHLAK : Kasubag Umum dan Kepegawaian/ Pejabat Fungsional Analis SDM Aparatur/Pengelola Kepegawaian
   10) Tingkat Digitalisasi Arsip : Kasubag Umum dan Kepegawaian/ Pejabat Fungsional Arsiparis/ Pengelola Arsip
   11) Tindaklanjut SP4N-Lapor : Pejabat PPID/Pengelola Layanan Pengaduan
   12) Tingkat Kematangan SPBE : Pejabat Fungsional Pranata Komputer/Pengelola SPBE Perangkat Daerah

13) Evaluasi Kualitas Kebijakan Publik	:	Kepala Bagian/Kepala Bidang pemrakarsa penyusunan kebijakan publik/regulasi
14) Evaluasi Kualitas Produk Hukum	:	Analis Hukum atau Kepala Bagian/ Kepala Bidang pemrakarsa penyusunan produk hukum
15) Evaluasi Pelayanan Publik	:	Kepala Bagian/Kepala Bidang/ Kepala UPTD yang melaksanakan fungsi pelayanan
16) Tingkat Pembangunan Zona Integritas	:	Kepala Bagian/Kepala Bidang/ Kepala UPTD yang melaksanakan fungsi pelayanan

b. *PTU* Lingkup Kecamatan:

1. Penanggung jawab	:	Camat
2. Ketua	:	Sekretaris Kecamatan
3. Sekretaris selaku asesor	:	Sekretaris Kecamatan atau Pegawai yang ditunjuk untuk menyampaikan penilaian mandiri
4. Pengampu Indikator Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	:	
1) Capaian Kinerja Perangkat Daerah	:	Kasubag Program dan Keuangan/ Pejabat Fungsional Perencana/ Analis Perencanaan
2) Nilai SAKIP Perangkat Daerah	:	Kasubag Program dan Keuangan/ Pejabat Fungsional Perencana/ Analis Perencanaan
3) Laporan Realisasi Anggaran	:	Kasubag Program dan Keuangan/ Pejabat Fungsional Perencana/ Analis Perencanaan
4) Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP	:	Kasubag Program dan Keuangan/ Pejabat Fungsional Perencana/ Analis Perencanaan
5) Nilai Pemanfaatan Sistem PBJ dan Kepatuhan Realisasi P3DN	:	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pengadaan (PP) Kecamatan
6) Nilai IP ASN	:	Kasubag Umum dan Kepegawaian/ Pejabat Fungsional/Pengelola Layanan/Pengelola Data
7) Indeks BerAKHLAK	:	Kasubag Umum dan Kepegawaian/ Pejabat Fungsional/Pengelola Layanan/Pengelola Data
8) Tingkat Digitalisasi Arsip	:	Kasubag Umum dan Kepegawaian/ Pejabat Fungsional Arsiparis/ Pengelola Arsip
9) Tindaklanjut SP4N-Lapor	:	Pejabat PPID/Pengelola Layanan Pengaduan
10) Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa/Keluarahan	:	Kepala Seksi Pemerintahan dan/atau Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
11) Evaluasi Kinerja Realisasi PBB Perkotaan & Perdesaan	:	Kepala Seksi Pemerintahan dan/atau Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
12) Evaluasi Pelaksanaan Kelompok Sadar Hukum	:	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban dan/atau Kepala Seksi Pemerintahan

13) Tingkat Penerapan SPBE	:	Pejabat Fungsional Pranata Komputer/Operator Pengelola Sistem di Kecamatan
14) Evaluasi Pelayanan Publik	:	Kepala Seksi Pelayanan
15) Nilai Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	:	Kepala Seksi Pelayanan
16) Tingkat Pembangunan Zona Integritas	:	Kepala Seksi Pelayanan

5. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab PTU
   a. Tugas PTU sebagai berikut:
      1) menyusun dan menetapkan rencana kinerja/rencana aksi Perangkat Daerah;
      2) melaksanakan dan melaporkan capaian kinerja/capaian rencana aksi Perangkat Daerah;
      3) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Perangkat Daerah; dan
      4) melaksanakan penilaian mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.
   b. Wewenang PTU sebagai berikut:
      1) menetapkan Rencana Kinerja/Rencana Aksi Perangkat Daerah setiap tahunnya; dan
      2) menetapkan hasil Penilaian Mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.
   c. Tanggung jawab PTU sebagai berikut:
      1) melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi di lingkup pemerintah daerah; dan
      2) menyampaikan Hasil Penilaian Mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah kepada Tim Evaluasi melalui Aplikasi Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI).

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 060/Kep.4701-ORG/2025
TENTANG PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025

TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025

1. SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

a. Pengarah	:	1. Wali Kota; dan 2. Wakil Wali Kota.
b. Penangungjawab	:	Sekretaris Daerah Kota Bandung.
d. Ketua *Strategic Transformation Unit* (STU)	:	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
e. Koordinator Pelaksanaan RB General	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
f. Koordinator Pelaksanaan RB Tematik	:	Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
g. Sekretaris *Strategic Transformation Unit* (STU)	:	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
h. Anggota *Strategic Transformation Unit* (STU)	:	1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah; 2. Dian Sandiany Hendy, S.STP, MAP Perencana Ahli Muda pada Badan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah; 3. Rahadyan, SE., M.I.P Analis Kebijakan Ahli Muda, Ketua Tim Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 4. Ratih Yuliasari, SE, M.Si Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 5. Niknik Rachmawati, S.Sos Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 6. Riza Fauzi Adam Syafa'at, SE Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan 7. Muhammad Armia Hudzaifah, S.STP Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

i. Pengampu Indikator RB General	:	Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan indikator RB General yang diampu.
j. Pengampu Indikator RB Tematik	:	Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan indikator RB Tematik yang diampu.
k. Ketua Tim Penilai Internal (TPI)	:	Inspektur Daerah.
l. Sekretaris Tim Penilai Internal (TPI)	:	Sekretaris Inspektorat.
m. Ketua Pelaksana Harian	:	Irban Khusus.
n. Anggota Tim Penilai Internal (TPI)	:	1. Firdan Ardjasubrata, ST, M.Si Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Muda pada Inspektorat; 2. Aldi Rahman Risyandi, S.Sos Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Muda pada Inspektorat; 3. Nikson Pola Sinaga, S.STP.,S.A.P.,M.Si Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Pertama pada Inspektorat; 4. Kartika Setianingrum, S.STP, M.Tr.Ip Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Pertama pada Inspektorat; dan 5. Asyifa Fauzia Rahma, S.STP.,M.Tr.AP Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Pertama pada Inspektorat.

2. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

No	Tim Pelaksana	Tugas	Tanggungjawab
1.	Pengarah	a. Memberikan Arahan Kebijakan Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. Menetapkan Kebijakan Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Memastikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tercapai sesuai dengan target dan sasaran kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan.
2	Penanggungjawab Pelaksana RB	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah b. Menyusun dan Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota c. Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	a. Memastikan Indikator Kinerja Pelaksanaan RB General dan RB Tematik telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah; dan b. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kepada Tim Evaluasi Nasional pada Bulan Oktober setiap tahunnya. c. Menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi briokrasi pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota

No	Tim Pelaksana	Tugas	Tanggungjawab
3	Ketua *Strategic Transformation Unit (STU)*	Memimpin Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.
4	Koordinator Pelaksana RB General	Mengkoordinasikan perangkat daerah yang menjadi pengampu indikator kinerja dalam pelaksanaan RB General	Memastikan Indikator Kinerja Pelaksanaan RB General telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah
5	Koordinator Pelaksana RB Tematik	Mengkoordinasikan perangkat daerah yang menjadi koordinator pelaksanaan tematik dalam pelaksanaan RB Tematik	Memastikan Indikator Kinerja Pelaksanaan RB Tematik telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah
6	Sekretaris *Strategic Transformation Unit (STU)*	Memberikan dukungan administrasi (tata usaha, keuangan maupun sarana dan prasarana) pelaksanaan tugas *Strategic Transformation Unit (STU)*	Memastikan dukungan adminitrasi, alokasi anggaran dan sarana prasarana kegiatan pengelolaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh *Strategic Transformation Unit (STU)* dapat terpenuhi.
7	Pengampu Indikator RB General	a. Menyusun dan melaksanakan target capaian kinerja pelaksanaan RB General; b. Menyusun, dan melaksanakan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General Tahunan; c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pada level instansi pemerintah daerah dan pada level perangkat daerah; dan d. Menyusun dan menetapkan rencana aksi tindaklanjut (RATL) atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB General yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal.	a. Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kebijakan RB General Pemerintah Daerah sesuai indikator yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada *Strategic Transformation Unit* (STU); dan b. Menyampaikan Nilai Hasil Evaluasi Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sesuai indikator yang diampu kepada *Strategic Transformation Unit* (STU).
8	Pengampu Indikator RB Tematik	a. Menyusun dan melaksanakan identifikasi permasalahan sesuai	a. Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kebijakan RB Tematik Pemerintah Daerah sesuai tema yang diampu setiap 6

No	Tim Pelaksana	Tugas	Tanggungjawab
		tema yang ditetapkan dalam RB Tematik; b. Menyusun dan melaksanakan target dan capaian kinerja RB Tematik; c. Menyusun kerangka kerja (*logical framework)* pelaksanaan RB Tematik yang ditetapkan; d. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik; dan e. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) pelaksanaan RB Tematik atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB Tematik yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal.	(enam) bulan kepada *Strategic Transformation Unit* (STU). b. Menyampaikan Nilai Hasil Evaluasi Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sesuai indikator yang diampu kepada *Strategic Transformation Unit* (STU).
9	Tim Penilai Internal (TPI)	a. Melaksanakan evaluasi ketercapaian indikator pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah; dan b. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rekomendasi Perbaikan Ketercapaian Indikator Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah.	Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi ketercapaian indikator pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah kepada Sekretaris Daerah.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002